Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting

Vol. 3, No.9, Agustus 2026
Hal 2396-2411

E-ISSN : 3032-0550
P-ISSN : 3032-1891

Site : https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema

Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2024

Muhammad Gigyn Alfharidzi Panigoro[1], Vecky A.J Masinambow[2], Audie O. Niode[3]
[1,2,3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juli 23, 2026
Revised Agusttus 1, 2026
Accepted Agustus 3, 2026

Kata Kunci:

Penanaman Modal Asing,
Penanaman Modal Dalam Negeri,
Dana Alokasi Umum,
Dana Alokasi Khusus,
Pertumbuhan Ekonomi

Keywords:

Foreign Direct Investment,
Domestic Investment,
General Allocation Fund,
Special Allocation Fund,
Economic Growth.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara tahun 2012–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder time series periode 2012–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan positif, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, PMA, PMDN, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh sinergi antara investasi dan kebijakan fiskal. Oleh karena itu, peningkatan investasi yang produktif serta pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang lebih efektif perlu terus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Foreign Direct Investment (FDI), Domestic Investment (DI), General Allocation Fund (GAF), and Special Allocation Fund (SAF) on the economic growth of North Maluku Province during the period 2012–2024. This research employed a quantitative approach using secondary time-series data covering the period from 2012 to 2024. The data were obtained from Statistics Indonesia (BPS), the Ministry of Investment/Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), and the Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of IBM SPSS software. The results indicate that, partially, Foreign Direct Investment (FDI) has a positive and significant effect on the economic growth of North Maluku Province. Meanwhile, Domestic Investment (DI) and the General Allocation Fund (GAF) have positive relationships but do not significantly affect economic growth. In contrast, the Special Allocation Fund (SAF) has a negative relationship and does not significantly affect economic growth.

Simultaneously, FDI, DI, GAF, and SAF have a significant effect on the economic growth of North Maluku Province. This study concludes that the economic growth of North Maluku Province is influenced by the synergy between investment and fiscal policy. Therefore, increasing productive investment and optimizing the management of the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund are essential to support sustainable regional economic development.

This is an open access article under the CC BY license

Corresponding Author:

Muhammad Gigyn Alfharidzi Panigoro
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Manado, Indonesia
Email: mhd.gigyn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang dengan tingkat pembangunan ekonomi yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah memiliki peran penting dalam merancang serta melaksanakan berbagai kebijakan guna mendorong peningkatan kualitas pembangunan nasional. Salah satu instrumen yang digunakan adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas perekonomian, serta mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan jangka panjang suatu negara yang mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa pada periode tertentu. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran maupun penerimaan negara dapat memengaruhi percepatan ataupun perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Pada tingkat daerah, indikator yang lazim digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), karena mampu menggambarkan kondisi serta perkembangan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Dalam ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi nasional diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu nilai pasar seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam kurun waktu tertentu [1], sedangkan pada tingkat regional kinerja ekonomi daerah dinilai menggunakan PDRB sebagai indikator utama. Penelitian ini mengukur pertumbuhan ekonomi berdasarkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang dinyatakan dalam persentase. Pertumbuhan ekonomi menjadi sasaran utama yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, guna mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beragam, yang menjadikannya salah satu tujuan investasi domestik dan asing. Karena ketersediaan sumber daya tersebut, yang didukung oleh pasokan bahan baku dari berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan bidang lainnya, yang dapat digunakan sebagai input dalam kegiatan industri, peluang untuk masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan agar selaras dengan potensi dan kebutuhan wilayahnya. Wewenang tersebut diarahkan untuk meningkatkan mutu layanan publik, memperkuat keterbukaan dalam pengelolaan APBD, menciptakan persaingan antar daerah yang sehat, serta mendorong lahirnya inovasi. Pertumbuhan ekonomi sendiri dipengaruhi

oleh banyak faktor, seperti investasi, konsumsi, belanja pemerintah, dan ekspor. Dari berbagai faktor tersebut, PMA dan PMDN berperan besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan penanaman modal untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong naiknya realisasi investasi. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang mencakup pertumbuhan ekonomi sekaligus perubahan dalam struktur perekonomian. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk menentukan prioritas alokasi sumber daya melalui kebijakan belanja daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan karakteristik tiap daerah.

Otonomi daerah telah mengubah pengelolaan keuangan negara dari sistem yang terpusat menjadi lebih desentralisasi. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola belanja daerah, dengan dukungan transfer dana dari pemerintah pusat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal bertujuan menciptakan alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien melalui hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pelaksanaannya dilakukan melalui transfer ke daerah yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam perekonomian, pemerintah memegang peranan penting melalui berbagai jenis pengeluaran untuk menunjang pembangunan. Pada penerapan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan guna mendorong pemerataan pembangunan sesuai potensi masing-masing wilayah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memaksimalkan penerimaan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terus diupayakan karena menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, peningkatan penerimaan tersebut harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebab besarnya PMA, PMDN, DAU, dan DAK tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang signifikan. [2]. Keberhasilan peningkatan PMA, PMDN, DAU dan DAK tidak hanya dinilai dari besarnya dana yang diterima, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu daerah di bagian timur Indonesia yang secara resmi dibentuk pada 4 Oktober 1999, melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 46 tahun 1999, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2003. Sebelum mendapatkan status sebagai provinsi sendiri, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara umumnya dievaluasi menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto, yaitu nilai tambah yang tercipta dari seluruh kegiatan produksi barang dan jasa di wilayah tersebut selama periode tertentu. Berdasarkan indikator ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara antara tahun 2012–2024.

Berdasarkan data dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara selama periode 2012–2024 mengalami fluktuasi. Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi 6,98%, kemudian mengalami penurunan ditahun 2013 menjadi 6,38% dan ditahun 2014 menurun sampai 5,49%. Selanjutnya Pertumbuhan Ekonomi kembali mengalami peningkatan pada beberapa tahun berikutnya. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang cukup signifikan ditahun 2021 hingga 2023. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas investasi dan perkembangan industri pengolahan berbasis hilirisasi di Provinsi Maluku Utara, khususnya pada sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel.

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai elemen, salah satunya adalah anggaran pemerintah. Besarnya anggaran tersebut ditentukan oleh jumlah pendapatan yang berhasil diperoleh dalam jangka waktu tertentu, sehingga kapasitas fiskal yang dimiliki akan berpengaruh pada

realisasi beragam program pembangunan. Dalam konteks otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi terpengaruh oleh berbagai sumber pembiayaan yang bersumber dari investasi dan juga dana transfer dari pemerintah pusat. Sumber-sumber investasi ini mencakup Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, sementara transfer fiskal diwujudkan melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Peningkatan pendapatan pemerintah akan memperluas kapasitas fiskal daerah dalam mendanai berbagai program yang ada. Dengan anggaran yang lebih mencukupi, pemerintah daerah akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan pengeluaran pembangunan, sehingga diharapkan dapat merangsang aktivitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Di Provinsi Maluku Utara, diharapkan pula adanya dampak positif dari pengaruh PMA, PMDN, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai pengaruh dari PMA, PMDN, DAU, dan DAK dalam konteks Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan informasi mengenai perkembangan PMA, PMDN, DAU, dan DAK di Provinsi Maluku Utara dari tahun 2012 hingga 2024, terdapat fluktuasi setiap tahunnya, dengan penanaman modal asing yang bervariasi dari total PMA selama periode tersebut. Ini mengindikasikan bahwa PMA di Provinsi Maluku Utara telah menunjukkan pertumbuhan positif dalam tiga belas tahun terakhir. Pada tahun 2012, nilai PMA di Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 812,2 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 2.535,9 miliar rupiah di tahun 2013, sebelum turun menjadi 1.052,1 miliar rupiah pada tahun 2014, dan kembali naik menjadi 2.547,8 miliar rupiah di tahun 2015, dengan proyeksi mencapai 65.886,1 miliar rupiah pada tahun 2024. Kenaikan dalam PMA Provinsi Maluku Utara erat kaitannya dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan potensi yang ada melalui promosi provinsi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan PMDN di Provinsi Maluku Utara juga menunjukkan tren yang tidak stabil, kadang-kadang mengalami lonjakan yang signifikan namun seringkali mengalami penurunan.

Selama tiga belas tahun terakhir, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Maluku Utara menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, realisasi DAU cenderung mengalami peningkatan pada periode 2012–2019. Pada tahun 2012, nilai DAU tercatat sebesar Rp540.389.811.000 dan meningkat menjadi Rp772.591.162.000 pada tahun 2013. Peningkatan tersebut berlanjut hingga tahun 2019 dengan realisasi mencapai Rp1.349.662.180.000. Tahun 2019 merupakan nilai Dana Alokasi Umum tertinggi Provinsi Maluku Utara sepanjang 13 tahun berjalan. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami penurunan menjadi 1.285.451.695.592 rupiah.

Tahun 2012 dana alokasi khusus sebesar 51.233.800.000 rupiah. meningkat pada tahun 2013 sampai di tahun 2019 menjadi 780.339.361.860 rupiah. pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 722.991.765.869 rupiah. kemudian di Tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 822.407.438.386 rupiah dan akhirnya pada tahun 2022 sampai di tahun 2024 turun menjadi 535.773.263.870 rupiah.

Perkembangan dalam PMA, PMDN DAU, dan DAK yang cukup mencolok di Provinsi Maluku Utara, menggerakkan perekonomian menuju lebih produktif, sehingga menarik perhatian pelaku bisnis dan investor untuk menanamkan modal di Provinsi Maluku Utara, yang berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara. Pemberian otonomi daerah membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebab pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang lebih luas untuk merancang rencana keuangan serta menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi juga memotivasi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang ada dan menjalin kerjasama dengan masyarakat demi menciptakan kesempatan kerja baru, sehingga aktivitas ekonomi di daerah pun meningkat.[3]. Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir tidak terpisahkan dari kemajuan di sektor industri pengolahan yang berbasis hilirisasi sumber daya alam, terutama di bidang pertambangan nikel dan

pembangunan smelter. Masuknya investasi besar dalam sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal, sehingga pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mengalami lonjakan yang cukup berarti dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia..

Meskipun terdapat peningkatan pada PMA, PMDN, DAU, dan DAK selama rentang penelitian, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara tidak selalu mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Situasi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan investasi maupun alokasi fiskal tidak selalu berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian guna memahami seberapa besar pengaruh PMA, PMDN, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara..

Hasil studi sebelumnya mengenai dampak PMA, PMDN, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan hasil yang bervariasi. Beragam penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, sementara studi lain mengungkapkan bahwa variabel terkait tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketidaksamaan hasil-hasil penelitian ini menandakan masih terdapat celah penelitian, oleh karena itu dilakukan penelitian lanjutan di Provinsi Maluku Utara pada periode 2012 hingga 2024.

2. METODE

2.1 Data Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data deret (*time series*) waktu yang mencakup rentang tahun 2012 hingga 2024. Data sekunder adalah informasi yang diambil dari sumber resmi yang telah dipublikasikan dan bisa diakses oleh publik. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis meliputi realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara dalam periode 2012 hingga 2024. Semua data tersebut diambil dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Di samping itu, penelitian ini juga didukung oleh berbagai sumber referensi, seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, hasil studi sebelumnya, situs resmi, serta literatur akademik lainnya.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi pada riset ini dilakukan dengan cara mengkaji literatur dan mendokumentasikan sumber-sumber dari berbagai publikasi resmi. Informasi diambil dari sumber-sumber seperti publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui website resmi setiap lembaga. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis menggunakan pendekatan kuantitatif, yang merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada pengolahan data angka melalui teknik analisis statistik untuk mencapai tujuan penelitian. Selanjutnya, pendekatan inferensial diterapkan ntuk memperkirakan parameter, serta menyusun dan menguji hipotesis, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat diterapkan secara lebih luas.

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan dua keompok variabel, terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y), sedangkan variabel independennya meliputi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Metode analisis data adalah tahapan yang digunakan dalam mengolah data penelitian, menginterpretasikan, dan mengevaluasi agar menghasilkan informasi agar sejalan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, analisis data memakai metode regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan serta pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Analisis regresi linear berganda adalah sebuah teknik analisis statistik yang dipakai dalam menguji serta menjelaskan korelasi antara variabel dependen (Y) dengan beberapa variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4, …, X_n). mengikuti metode ini, dapat diketahui arah dan besaran pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = \beta_0 + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 + \beta_4 X4 + e}$$

Untuk mengetahui pengaruhnya variabel independen atas variabel dependen, penelitian ini memakai model regresi linear berganda, Model tersebut digunakan untuk mengestimasi hubungan antarvariabel sekaligus mengukur arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel. Persamaan regresi dalam penelitian ini jelaskan dalam rumus berikut:

$$\mathbf{Y = \beta_0 + \beta_1 LnX1 + \beta_2 LnX2 + \beta_3 LnX3 + \beta_4 LnX4 + e}$$

Analisis regresi linear berganda dipergunakan dalam mengestimasi nilai variabel dependen terhadap perubahan pada satu atau lebih variabel independen. Metode ini bertujuan mengidentifikasi arah hubungan serta mengukur besaran pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen, yang bersifat positif maupun negatif.

2.4. Uji Statistik

Untuk mengetaui berpengaruh atau tidak variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan beberapa uji statistik berikut :

1. Uji Parisal (Uji t)

Pengujian parsial (uji *t*) dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya tiap variabel independen atas variabel dependen secara terpisah. Proses pengujian dibuat untuk membandingkan nilai *t* hitung dengan *t* tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Rumus hitung uji *t* adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Kriteria mengambil keputusan pada uji *t* mengacu pada nilai signifikansi (*p-value*). Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

2. Uji Simultan (Uji F)

Ghozali [4] Pengujian F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen pada model regresi secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Kriteria pengujian sebagai berikut :

Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05) atau *F* hitung > *F* tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05) atau *F* hitung < *F* tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) yaitu mengukur besarnya kontribusi variabel independen (X_1, X_2, X_3, dan seterusnya) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Y). Nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin kecil nilai R^2, semakin terbatas kemampuan variabel independen dalam menjelaskan

perubahan pada variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menjelaskan variasi variabel dependen. [4].

2.5 Uji Asumsi Klasik

Merupakan tahapan Pengujian sebelum analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memastikan kelayakan model dengan menguji terpenuhinya asumsi-asumsi statistik. Pemenuhan asumsi tersebut diperlukan agar hasil estimasi regresi bersifat valid dan dapat diinterpretasikan secara tepat. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Model regresi dapat dikatakan layak apabila seluruh asumsi klasik dalam penelitian ini telah terpenuhi.

2.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji nilai residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. emenuhan asumsi normalitas diperlukan agar model regresi linear berganda memenuhi syarat analisis, sehingga hasil estimasi parameter dan pengujian hipotesis dapat ditafsirkan secara tepat.

Uji dilakukan menggunakan metode Shapiro–Wilk melalui (SPSS). Metode ini dipakai karena jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian kurang dari 50 sampel, sehingga uji Shapiro–Wilk dianggap lebih tepat dan memiliki kemampuan yang baik dalam mendeteksi normalitas data.

Dalam uji normalitas adalah diukur sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka residual dinyatakan berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi.
2. Apabila nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi.

2.5.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali [4] uji multikolinearitas bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya hubungan yang tinggi setiap variabel independen pada model regresi.. Pengujian ini dilakukan dengan mengamati nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Nilai *tolerance* menggambarkan kedudukan variasi sebuah variabel independen tidak dapat diperjelas oleh variabel independen yang lain, sedangkan nilai VIF menunjukkan tingkat inflasi varians akibat adanya korelasi antara variabel independen. Dengan model regresi dikatakan bebas multikolinearitas apabila setiap variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,10. Persamaan yang digunakan adalah :

$$VIF = \frac{1}{(1 - r_{23}^2)}$$

Nilai VIF menunjukkan besarnya peningkatan varians suatu estimator akibat adanya multikolinearitas. Semakin tinggi tingkat korelasi antarvariabel independen, nilai VIF akan semakin besar dan bahkan dapat mendekati tak terhingga [5]. Sebaliknya, apabila tidak terdapat korelasi antarvariabel independen, nilai VIF sama dengan 1. Oleh karena itu, VIF digunakan sebagai indikator untuk mendeteksi gejala multikolinearitas pada model regresi berganda.

Untuk menguji ada tidaknya multikonlinearitas dapat dilihat dari hasil :

1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka terdapat indikasi terjadinya multikolinearitas.
2. Jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat indikasi multikolinearitas.

2.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dipakai untuk mengetahui varians residual pada model regresi bersifat konstan atau berbeda pada setiap pengamatan. Metode-metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas yaitu berupa uji Goldfeld-Quandt, White, Korelasi Rank Spearman, Park, Glejser, dan Breusch-Pagan-Godfrey. Sehingga pada penelitian ini diggunakan pengujian berupa metode **Glejser**.

Uji Glejser digunakan dengan meregresikan nilai absolut residual hasil regresi utama pada variabel independen. Pengujian ini dimaksud untuk memperoleh ada atau tidak gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dasar keputusan dalam uji heteroskedastisitas metode Glejser yaitu:

jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas; sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

2.5.4 Uji Autokorelasi

Uji ini dipakai agar mengetahui terdapat adakah hubungan antara residual suatu periode pengamatan dengan periode sebelumnya menggunakan model regresi linear. Keberadaan autokorelasi mengindikasi bahwa residual tidak bersifat independen, sehingga bisa mempengaruhi keakuratan hasil perkiraan regresi. Dengan begitu, model regresi yang baik yaitu model yang tidak mengandung autokorelasi. Menurut [6], gejala autokorelasi biasanya dijumpai dalam data waktu runtut(*time series*) karena setiap observasi memiliki keterkaitan dengan observasi pada periode sebelumnya.

Pada penelitian ini, dipakai uji Durbin–Watson (*Durbin–Watson Test*). Uji ini digunakan dalam mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi pada model regresi linear berganda. Dasar dalam mengambil keputusan pada uji Durbin–Watson berupa:

1. Jika nilai Durbin-Watson berada di antara -2 hingga +2 atau mendekati angka 2, maka model regresi tidak mengalami autokorelasi.
2. Jika nilai Durbin-Watson berada di bawah -2, maka terjadi autokorelasi positif.
3. Jika nilai Durbin-Watson berada di atas +2, maka terjadi autokorelasi negatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis, Penanaman Modal Asing (PMA) terbukti memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan realisasi investasi dari luar negeri mampu mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Dengan demikian, semakin besar nilai PMA yang berhasil direalisasikan, semakin besar pula peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.

Penemuan penelitian ini selaras dengan Teori Harrod-Domar yang menempatkan investasi sebagai salah satu determinan utama pertumbuhan ekonomi melalui proses akumulasi modal (capital formation). Dalam perspektif teori tersebut, investasi tidak hanya memberikan dorongan terhadap permintaan agregat dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi perekonomian sehingga mampu menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketika investasi meningkat, dunia usaha memperoleh tambahan modal untuk memperluas kegiatan produksi, meningkatkan penggunaan teknologi, serta menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya mendorong peningkatan output daerah.

Kondisi tersebut terlihat pada perkembangan perekonomian Provinsi Maluku Utara selama beberapa tahun terakhir. Meningkatnya arus investasi asing terutama pada sektor industri pengolahan berbasis sumber daya mineral telah mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi di daerah. Kehadiran perusahaan-perusahaan berskala besar telah meningkatkan aktivitas produksi, memperluas

permintaan terhadap tenaga kerja, serta menciptakan keterkaitan ekonomi dengan sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, transportasi, konstruksi, jasa, dan usaha mikro yang mendukung kegiatan industri. Hubungan antarsektor tersebut menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang mendorong meluasnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor perekonomian..

Perkembangan industri hilirisasi nikel menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat hubungan tersebut. Upaya pemerintah dalam memperkuat kebijakan hilirisasi mineral telah menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, sehingga mendorong bertambahnya minat investor asing untuk berinvestasi di Provinsi Maluku Utara. Investasi tersebut tidak hanya diarahkan pada kegiatan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga pada pembangunan kawasan industri, fasilitas pengolahan, infrastruktur pendukung, serta pengembangan rantai pasok industri. Kondisi tersebut memberikan nilai tambah terhadap perekonomian daerah karena sebagian besar proses produksi dilakukan di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Selain meningkatkan kapasitas produksi, investasi asing juga membawa transfer teknologi, penerapan sistem manajemen yang lebih modern, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penggunaan teknologi produksi yang semakin efisien. Kehadiran teknologi dan manajemen yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga menghasilkan output yang lebih besar. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut mampu meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat struktur perekonomian Provinsi Maluku Utara.

Dari sisi ketenagakerjaan, meningkatnya investasi asing juga membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Bertambahnya lapangan pekerjaan menyebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat yang kemudian mendorong naiknya daya beli sehingga konsumsi rumah tangga ikut mengalami peningkatan. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong berkembangnya sektor perdagangan dan jasa sehingga aktivitas ekonomi daerah semakin meningkat. Proses tersebut mengindikasikan bahwa manfaat investasi asing tidak hanya dirasakan oleh sektor industri, tetapi juga memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa investasi asing merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang berkontribusi dalam mendukung proses pembangunan di tingkat daerah. Keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dapat dilengkapi melalui masuknya investasi swasta, khususnya investasi asing yang memiliki kapasitas modal relatif besar. Oleh karena itu, keberadaan PMA dapat mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi, memperluas basis produksi, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Penemuan yang diperoleh dalam penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian AR dan Zein [7], Jufrida dkk. [8], serta Ningrum dan Indrajaya. Ketiga penelitian tersebut menjelaskan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi pada sektor-sektor produktif, perluasan penyerapan tenaga kerja, serta bertambahnya kapasitas produksi. Konsistensi hasil tersebut mengindikasikan bahwa PMA masih memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi, terutama di daerah yang didukung oleh potensi sumber daya alam dan memiliki daya tarik investasi yang tinggi.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan investasi asing agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal, meningkatkan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri, serta mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dengan langkah tersebut, manfaat investasi tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha, tetapi juga mampu memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, Penemuan penelitian ini menegaskan bahwa Penanaman Modal Asing merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Besarnya investasi yang masuk mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi, memperluas

kesempatan kerja, dan menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi yang saling terhubung. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat iklim investasi melalui kebijakan yang mampu menjaga kepastian berusaha, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta mengembangkan sumber daya manusia agar kontribusi investasi asing terhadap pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

3.2 Pengaruh PMDN terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan arah hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Namun demikian, pengaruh tersebut belum terbukti memberikan kontribusi yang signifikan selama periode penelitian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan realisasi investasi domestik belum sepenuhnya mampu mendorong aktivitas ekonomi yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerahm secara optimal.

Secara teoritis, Penemuan penelitian ini masih selaras dengan Teori Harrod-Domar yang menempatkan investasi sebagai salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan modal. Teori tersebut menjelaskan bahwa akumulasi modal akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga mampu mendorong pertumbuhan output. Namun demikian, teori tersebut juga mengisyaratkan bahwa besarnya investasi saja belum tentu menghasilkan pertumbuhan ekonomi apabila investasi tersebut belum dimanfaatkan secara produktif atau belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi nilai tambah yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian.

Kondisi tersebut dapat menjelaskan hasil penelitian di Provinsi Maluku Utara. Selama periode penelitian, investasi dalam negeri memang terus berkembang, namun sebagian besar investasi domestik masih didominasi oleh kegiatan usaha dengan skala relatif kecil dan menengah serta belum seluruhnya difokuskan pada berbagai sektor yang memiliki kemampuan menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar.

Sebagian investasi domestik masih terkonsentrasi pada sektor perdagangan, jasa, konstruksi, dan kegiatan usaha lainnya yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal. Meskipun sektor-sektor tersebut tetap memiliki peranan dalam perekonomian daerah, kontribusinya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak sebesar investasi yang masuk ke sektor industri pengolahan atau sektor-sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Selain itu, karakteristik perekonomian Provinsi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa perkembangan ekonomi daerah lebih dominan dipengaruhi oleh berkembangnya industri pengolahan berbasis sumber daya mineral yang sebagian besar didukung oleh investasi berskala besar. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi investasi domestik relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan investasi asing yang memiliki kemampuan pembiayaan, teknologi, serta kapasitas produksi yang lebih besar. Akibatnya, pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi belum terlihat secara optimal selama periode penelitian.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah masih terbatasnya kemampuan pelaku usaha domestik dalam melakukan ekspansi usaha pada sektor-sektor strategis yang membutuhkan modal besar, teknologi modern,serta tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan, penggunaan teknologi, serta rendahnya skala produksi menyebabkan sebagian investasi domestik lebih banyak beroperasi pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan secara bertahap. Oleh karena itu, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan jangka waktu tertentu sebelum hasil atau kontibusinya dapat diamati secara nyata.

Di sisi lain, peningkatan investasi domestik tetap memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi daerah. PMDN berperan dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat lokal, meningkatkan aktivitas perdagangan, serta memperkuat perekonomian daerah dari sisi pelaku usaha

domestik. Peran tersebut menjadi penting karena investasi dalam negeri pada umumnya memiliki keterkaitan yang lebih erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan memperkuat struktur ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Hasil analisis dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan investasi domestik bukan hanya ditentukan pada besarnya nilai investasi yang direalisasikan, tetapi juga oleh kualitas investasi tersebut. Investasi yang diarahkan pada sektor-sektor produktif, industri pengolahan, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan infrastruktur ekonomi, serta peningkatan produktivitas usaha akan menghasilkan pengaruh yang lebih signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan investasi yang hanya berorientasi pada kegiatan konsumtif atau perdagangan lokal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas investasi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Penemuan dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa investasi dalam negeri belum selalu mampu memberikan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan karakteristik daerah, struktur perekonomian, sektor tujuan investasi, serta efektivitas pemanfaatan modal menyebabkan kontribusi PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi berbeda-beda pada setiap wilayah. Dengan demikian, hasil penelitian ini masih berada dalam kerangka teori dan hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa efektivitas investasi sangat dipengaruhi oleh kualitas, produktivitas, dan sektor penerima investasi. Berdasarkan hasil tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu terus mendorong peningkatan kualitas investasi domestik melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyederhanaan perizinan, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha lokal, perluasan dan penguatan kawasan industri, disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, sinergi antara investor domestik dan investor asing juga perlu diperkuat agar pelaku usaha lokal dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri yang berkembang di Provinsi Maluku Utara. Melalui kebijakan tersebut, investasi dalam negeri diharapkan tidak hanya mengalami peningkatan secara kuantitatif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri tetap memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Meskipun pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi belum terlihat secara nyata selama periode penelitian, investasi domestik tetap menjadi fondasi penting dalam memperkuat struktur perekonomian daerah, meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, serta mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkesinambungan di masa mendatang.

3.3 Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan arah hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Namun demikian, peningkatan alokasi DAU tersebut belum terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tambahan penerimaan dari DAU belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah secara langsung, sebagaimana tercermin dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi.

Secara konseptual, temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui Teori Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh Oates. Teori tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing. Melalui penerapan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat menyalurkan Dana Alokasi Umum sebagai salah satu sarana pemerataan kemampuan fiskal antardaerah,

agar setiap daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.

Namun demikian, tujuan utama DAU bukanlah secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan menjaga kapasitas fiskal pemerintah daerah agar tetap mampu menjalankan pelayanan dasar dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, besarnya alokasi DAU tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Dampak DAU terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dan memanfaatkan dana tersebut dalam pelaksanaan pembangunan.

Kondisi tersebut dapat menjelaskan hasil penelitian di Provinsi Maluku Utara. Sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki peran penting bagi pemerintah daerah, DAU diperuntukan untuk membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus belanja pegawai, belanja operasional, pelayanan publik, serta berbagai kegiatan administratif lainnya. Penggunaan DAU yang lebih banyak diarahkan pada pembiayaan rutin menyebabkan dampaknya terhadap peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi menjadi relatif terbatas. Meskipun belanja tersebut tetap diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan, manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu dapat dirasakan secara langsung.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh peningkatan investasi produktif, pengembangan sektor industri, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Sementara itu, sebagian besar penggunaan DAU lebih berorientasi pada penyediaan layanan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, meskipun DAU berperan penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung bersifat tidak langsung dan "membutuhkan jangka waktu yang lebih lama agar pengaruhnya dapat tercermin dalam peningkatan aktivitas ekonomi.

Karakteristik perekonomian Provinsi Maluku Utara juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian lebih banyak didorong oleh berkembangnya sektor industri pengolahan, pertambangan, dan investasi berskala besar. Perkembangan sektor-sektor tersebut lebih dipengaruhi oleh investasi swasta dibandingkan oleh dana transfer pemerintah. Kondisi tersebut mengakibatkan peran DAU dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relatif lebih terbatas dibandingkan dengan investasi yang memiliki pengaruh lebih langsung dalam meningkatkan kapasitas produksi daerah.

Meskipun demikian, keberadaan DAU tetap memiliki arti penting dalam pembangunan daerah. Dana tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, pemeliharaan administrasi pemerintahan, serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah. Manfaat tersebut tidak selalu tercermin dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas DAU sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan anggaran daerah. Apabila sebagian alokasi DAU dapat diarahkan secara lebih optimal pada belanja yang bersifat produktif, meliputi pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor-sektor unggulan daerah, dan pemberdayaan usaha produktif masyarakat, maka manfaat DAU terhadap pertumbuhan ekonomi berpotensi menjadi lebih besar.

Penemuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa DAU belum selalu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah [9]. Dengan demikian, keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi dana yang diterima, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan anggaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengarahkan belanja publik pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu terus meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Alokasi Umum melalui penguatan perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengalokasian anggaran yang lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, DAU tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mampu menjadi salah satu pendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dengan demikian, Penelitian ini menunjukkan bahwa DAU tetap menjadi instrumen penting dalam pembangunan daerah meskipun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi belum terlihat secara langsung. Peran DAU tercermin melalui kemampuannya dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah, mendukung pelayanan publik, dan menyediakan landasan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3.4 Pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan negatif dengan Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara, tetapi pengaruh ini belum menunjukkan efek yang signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi selama waktu yang diteliti. Penemuan ini menunjukkan bahwa perubahan alokasi DAK belum secara langsung diikuti oleh perubahan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, hasil penelitian ini belum dapat disimpulkan, DAK memberikan dampak yang merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari pemanfaatan DAK belum sepenuhnya terlihat dalam periode penelitian.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui Wagner's Law yang menyatakan bahwa seiring pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi, aktivitas Negara akan semakin luas sehingga pengeluaran pemerintah meningkat [10]. Dalam perspektif tersebut, belanja pemerintah tidak selalu menghasilkan dampak ekonomi secara langsung, terutama apabila diarahkan pada pengembangan infrastruktur daerah, peningkatan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta penyediaan fasilitas publik yang memadai, serta berbagai program pembangunan lainnya yang manfaatnya baru dirasakan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, tidak semua peningkatan pengeluaran pemerintah akan langsung tercermin dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama.

Karakteristik Dana Alokasi Khusus berbeda dengan Dana Alokasi Umum. salah satu instrumen pendanaan dari pemerintah pusat yang penggunaannya telah ditentukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, irigasi, air minum, sanitasi, kelautan, pertanian, dan sektor-sektor strategis lainnya. Karena penggunaannya bersifat spesifik, ruang gerak pemerintah daerah dalam mengalokasikan DAK relatif lebih terbatas dibandingkan dengan DAU. Akibatnya, Dampak DAK terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh sejauh mana efektivitas pelaksanaan program, kualitas pembangunan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hasil pembangunan tersebut.

Kondisi tersebut dapat menjelaskan hasil penelitian di Provinsi Maluku Utara. Selama periode penelitian, sebagian besar alokasi DAK diarahkan untuk membiayai pembangunan fasilitas pelayanan publik dan infrastruktur dasar. Program-program tersebut memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki akses terhadap pendidikan dan kesehatan, memperkuat konektivitas wilayah, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Manfaat dari pembangunan tersebut umumnya tidak langsung tercermin dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena membutuhkan waktu sehingga pembangunan infrastruktur tersebut dapat digunakan secara efisien dan optimal oleh masyarakat dan dunia usaha.

Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku Utara masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan antarwilayah. Sebagian alokasi DAK digunakan untuk meningkatkan akses layanan dasar di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Pembangunan jalan,

fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya lebih berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat daripada menghasilkan tambahan output ekonomi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung muncul secara bertahap seiring meningkatnya produktivitas masyarakat dan berkembangnya aktivitas ekonomi di wilayah yang memperoleh manfaat pembangunan.

Selain faktor waktu, efektivitas DAK juga dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan program, koordinasi antarinstansi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan program yang didanai DAK dengan kebijakan pembangunan daerah. Apabila pembangunan fisik tanpa disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudahan investasi, dan pengembangan sektor produktif, maka manfaat ekonomi yang dihasilkan akan menjadi kurang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan DAK tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya dana yang diterima pemerintah daerah, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola anggaran secara efektif dan memastikan keberlanjutan program yang telah direncanakan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah memerlukan sinergi antara belanja pemerintah dan investasi swasta. Infrastruktur yang dibangun melalui DAK pada dasarnya dapat meningkatkan daya tarik investasi dengan memperbaiki aksesibilitas, menurunkan biaya distribusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, Manfaat tersebut berpotensi memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi apabila diikuti oleh meningkatnya aktivitas investasi, berkembangnya sektor usaha produktif, dan meningkatnya produktivitas masyarakat. Dengan demikian, DAK berperan sebagai faktor pendukung yang menciptakan lingkungan pembangunan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini memperkuat Penemuan dari sejumlah penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) belum mampu menunjukkan pengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan Penemuan yang muncul antar penelitian dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah, arah pemanfaatan DAK, tingkat efektivitas pelaksanaan program, serta rentang waktu penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tetap memiliki kesesuaian dengan teori dan kajian terdahulu yang menjelaskan bahwa keberhasilan DAK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan kebijakan serta lamanya proses hingga manfaat pembangunan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian daerah.

Berdasarkan Penemuan penelitian ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program yang didanai melalui DAK agar manfaat pembangunan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Pembangunan infrastruktur dasar perlu diintegrasikan dengan pengembangan kawasan industri, meningkatnya kapasitas SDM, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan sektor-sektor unggulan daerah. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan yang dibiayai melalui DAK bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru yang mendukung Pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Oleh sebab itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keberadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih memiliki kontribusi strategis dalam menunjang pembangunan daerah. Meskipun pengaruh langsungnya terhadap pertumbuhan ekonomi belum terlihat selama periode penelitian karena keterbatasan studi, DAK berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang memperkuat fondasi ekonomi melalui penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan demikian, peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu upaya strategis dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara.

3.5 Pengaruh PMA, PMDN, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK), secara kolektif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kombinasi faktor investasi dan kebijakan fiskal yang saling melengkapi. Hasil ini menunjukkan bahwa sinergi antara aktivitas investasi dan dukungan fiskal melalui transfer pemerintah berperan dalam memengaruhi perkembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan investasi serta optimalisasi pemanfaatan dana transfer agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara dapat semakin maksimal.

4. KESIMPULAN

PMA menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Penemuan penelitian ini mengindikasikan investasi asing adalah salah satu faktor penting yang mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas produksi, pengembangan sektor industri, serta perluasan kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi asing tetap memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang mampu mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara.

PMDN mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi belum memberikan pengaruh yang nyata selama periode penelitian. Kondisi tersebut menandakan bahwa peningkatan investasi dalam negeri belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena efektivitas investasi sangat dipengaruhi oleh kualitas investasi, sektor tujuan investasi, serta kemampuan investasi tersebut dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

DAU memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi belum memberikan dampak yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi utama DAU lebih diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung bersifat tidak langsung. Oleh sebab itu, kontribusi DAU terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan dengan besarnya alokasi dana yang diterima, tetapi juga oleh kualitas tata kelola keuangan daerah dan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk sektor-sektor produktif.

menunjukkan arah hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pengaruh tersebut belum terbukti signifikan secara statistik selama periode pengamatan. Hasil tersebut tidak mengindikasikan bahwa keberadaan DAK menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih menunjukkan bahwa manfaat pembangunan yang dibiayai melalui DAK membutuhkan waktu agar dapat memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, efektivitas DAK sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta keberlanjutan pemanfaatan hasil pembangunan.

Secara keseluruhan, PMA, PMDN, DAU, dan DAK terbukti memengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Hasil ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh perpaduan antara kegiatan investasi dan kebijakan fiskal pemerintah dalam mendukung pembangunan. Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui kebijakan yang dapat mendorong investasi produktif, memperkuat tata kelola keuangan daerah, serta memaksimalkan potensi ekonomi Provinsi Maluku Utara.

REFERENSI

[1] N. G. Mankiw, *Makroekonomi*, edisi ke-7, C. Sungkono, Penerjemah. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2009.

[2] A. Halim, *Analisis Investasi*, edisi ke-1. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2003.
[3] M. Kuncoro, *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta, Indonesia: Erlangga, 2004.
[4] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, edisi ke-9. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
[5] D. N. Gujarati dan D. C. Porter, *Dasar-Dasar Ekonometrika*, edisi ke-5, buku 2. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2012.
[6] M. D. AR dan A. Zein, "Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, vol. 2, no. 1, hal. 54–68, Mar. 2016.https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6644
[7] Jufrida, M. N. Syechalad, M. Nasir, dan S. Sofyan, "Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, vol. 2, no. 1, hal. 81–94, Mar. 2016.https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6647
[8] L. P. L. Ningrum dan I. G. B. Indrajaya, "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, vol. 7, no. 9, hal. 2030–2058, Sep. 2018
[9] Wardani, N. T., & Muchtolifah, M. (2022). yang menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur.
[10] Wagner, A. (1958). *Three Extracts on Public Finance*. Dalam R. A. Musgrave & A. T. Peacock (Eds.), *Classics in the Theory of Public Finance*. London: Macmillan.